



## **PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA**

**( STUDI KASUS DI DESA TAMAN,KECAMATAN GRUJUGAN,KABUPATEN BONDOWOSO)**

### **JURNAL SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember.

**OLEH :**

**ACHMAD GHUFRON MAULANA**

**NIM. 1610512006**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**2017**

## **PERSETUJUAN**

# **PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA**

**(STUDI KASUS DI DESA TAMAN, KECAMATAN GRUJUGAN,  
KABUPATEN BONDOWOSO)**

## **JURNAL SIKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

Disusun Oleh :

**ACHMAD GHUFRON MAULANA  
NIM. 1610512006**

Disetujui,

Dosen pembimbing :

**Drs. Kahar Haerah, M.Si  
NIP. 1966011991011001**

PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA  
(STUDI KASUS DI DESA TAMAN, KECAMATAN GRUJUGAN, KABUPATEN  
BONDOWOSO)

Oleh :

Achmad Ghufron Maulana  
NIM.1610512006

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan tertib administrasi desa di desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso.(2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan tertib administrasi desa di desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sebagai sumber data primer adalah wawancara kepala desa Taman, sekretaris desa Taman dan Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, serta warga desa Taman. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku administrasi desa Taman yang digunakan untuk penyelenggaraan tertib administrasi desa.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) penyelenggaraan tertib administrasi desa di desa Taman, kecamatan Grujugan, kabupaten Bondowoso dilakukan melalui pencatatan atau register administrasi yang terbagi menjadi beberapa bagian, dan dicatat dalam buku-buku administrasi desa yang di dalamnya terdapat berbagai kolom yang harus diisi dengan lengkap berikut juga terdapat cara pengisiannya, dengan kesesuaian pedoman kerja, juga melalui tertibnya penyimpanan dokumen (kearsipan) di Kantor Balai Desa Taman, penyimpanan dokumen tersebut berupa data-data dan surat-surat penting. (2) Faktor pendukung penyelenggaraan tertib administrasi di desa Taman adalah lengkapnya pedoman pengisian buku administrasi, lengkapnya perangkat keras yaitu sarana dan fasilitas kerja, pembentukan struktur kerja yaitu penataan dan pembagian tugas pada perangkat desa, dan selektif perekrutan perangkat desa, factor penghambat meliputi kurangnya kesadaran perangkat desa dalam disiplin kerja, kemampuan kerja perangkat desa kurang memadai, kesadaran masyarakat desa kurang, dan masih kurang adanya sosialisasi tertib administrasi dari pemerintahan kecamatan terhadap perangkat desa.

Kata kunci : Tertib administrasi, pemerintahan desa, buku administrasi, pedoman kerja.

## **I. PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tersebut, desa diurus oleh sekelompok orang yang diberi wewenang untuk itu, yang disebut sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggungjawab memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam system

pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam pasal 200 UU No.32 tahun 2004. Menurut UU No.6 tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Telah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Kewajiban tersebut hanya mencakup lingkup desa, artinya pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi desa hanya pada konteks untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan. Pada dasarnya administrasi terdiri dari 2 (dua) macam yaitu administrasi publik dan administrasi privat, namun kedua administrasi ini memiliki lingkup yang luas, yaitu meliputi kebutuhan masyarakat negara secara umum.

Agar tujuan untuk menertibkan administrasi desa benar-benar dapat tercapai seperti yang yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai atau optimal, sehingga dalam merealisasikan penyelenggaraan tertib administrasi desa tidak terlalu bergantung pada perintah ataupun bantuan dari pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah.

Tertib administrasi desa dapat dikatakan terselenggara dengan tertib dan baik, apabila seluruh penyelenggaraannya dapat mencatat seluruh kegiatan serta mengisi semua buku-buku dan pelaporan administrasi yang sebenarnya terjadi dalam intern pemerintahan desa ataupun dimasyarakat. Dan juga pelaksana dapat menyusun dan menyimpan semua dokumen-dokumen yang berisi data-data dan surat-surat peting yang ada dikantor desa.

Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis melakukan penelitian ilmiah mengenai penyelenggaraan tertib administrasi desa, dengan memilih Desa Taman yang terletak di Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso sebagai lokasi penelitian dengan aparat pemerintahan desa sebagai objek penelitian. Karena penulis beranggapan bahwa penyelenggaraan tertib administrasi di desa tersebut masih kurang disiplin dan tidak sepenuhnya terlaksana sehingga memerlukan perhatian dalam penyelenggaraannya.

Hal tersebut diatas dapat dilihat dari masih kosongnya beberapa kolom pada buku-buku administrasi di desa tersebut, yang seharusnya semua kolom pada buku-buku administrasi

tersebut harus sudah terisi secara rutin dan disiplin sesuai dengan perintah undang-undang Nomor 32 tahun 2006. Semua permasalahan yang tersebut diatas diduga disebabkan oleh kurang disiplinnya perangkat desa Taman dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait tertib administrasi desa. Disamping itu, Penyelenggaraan tertib administrasi di desa Taman Kecamatan Grugugan tidak berlangsung dengan baik karena tingkat pengetahuan tentang administrasi desa kurang dimiliki oleh sebagian perangkat desa Taman kecamatan Grugugan.

Selain masalah kedisiplinan perangkat desa yang tersebut diatas, masalah lain yang menyebabkan Pemerintah Desa taman belum sepenuhnya melaksanakan tertib Administrasi Desa ialah tidak adanya pelatihan berkelanjutan terkait penyelenggaraan tertib administrasi desa oleh pihak Kecamatan Grugugan.

Namun dipertengahan tahun 2016 Administrasi desa Taman dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan kemampuan perangkat desa baru yang direkrut dengan beberapa tahapan ujian mempunyai kinerja yang jauh lebih baik dari perangkat desa sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa tertib administrasi di desa Taman Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso sudah terlaksana tetapi masih belum terselenggara secara optimal untuk memudahkan pelayanan masyarakat dan pekerjaan bidang administrasi.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini antara lain: Bagaimanakah penyelenggaraan tertib administrasi desa di desa Taman, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso?, dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat penyelenggaraan tertib administrasi desa di desa Taman, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso ?

Dimana tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Taman adalah, untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan tertib administrasi desa di desa Taman, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso, dan juga untuk dapat mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penyelenggaraan tertib administrasi desa di desa Taman Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso.

Dengan demikian, penulis berharap hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan informasi bagi aparat penyelenggara tertib administrasi desa di Indonesia khususnya di desa Taman Kec. Grugugan, Kab. Bondowoso. Adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang memadai bagi aparat desa dalam menyelenggarakan tertib administrasi desa, dengan pengetahuan tersebut para aparat desa dapat mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab tidak terlaksananya tertib administrasi desa yang baik. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama.

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **1. Definisi Administrasi**

Secara Etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin yaitu *ad* dan *ministrare* yang berarti membantu, melayani, atau memenuhi. Di Indonesia dikenal dalam dua bahasa yaitu

*administratie* dari bahasa Belanda dan *clerical work, paper work, atau office work* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, administrasi dikenal sejak awal masuknya sistem pemerintahan Belanda di Indonesia yaitu sistem administrasi publik klasik. Istilah *administratie* mencakup pengertian *stelselmatige verkrijging, en verwerking van gegevens* yang berarti tata usaha atau administrasi dalam arti sempit dan *bestuur en beheer* yang memiliki arti manajemen kegiatan-kegiatan organisasi dan sumber dayanya (finansial, personel, materiil, gudang dan sebagainya).

Sedangkan dalam bahasa Inggris meliputi definisi administrasi dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit adalah kegiatan berupa pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau institusi. Administrasi dalam arti luas adalah proses (rangkaiannya) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

Menurut Sondang P Siagian “Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, (Syafri, M.si, 2012 :Studi Tentang Administrasi Publik).

## 2. Prinsip Administrasi

Prinsip merupakan kebenaran fundamental yang dijadikan dasar untuk bertindak atau pedoman yang harus diikuti. Henri Fayol mengemukakan empat belas prinsip administrasi, yaitu : *Division of work* : pembagian tugas pekerjaan atau spesialisasi. Prinsip ini merupakan upaya yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan efisiensi dalam menggunakan tenaga kerja, *Authority dan responsibility*: wewenang dan tanggung jawab harus saling berkaitan, *Discipline* : berarti sikap dan perilaku yang selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, *Unity of command* : kesatuan komando / perintah, *Unity of direction* : terdapat satu pimpinan dan kesatuan tujuan arah yang sama, *Subordination of individual interest to the general interest* : mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, *Remuneration* : pemberian ganjaran sebagai balas jasa, *Centralization* : penugasan wewenang yang dimiliki, *Scalar chain/jenjang hierarki* : tingkat wewenang yang dimiliki, *Order* : ketertiban, *Equity* : pelaksanaan yang adil pada semua pihak, *Stability of tenure of personel* : Stabilitas jabatan karyawan, *Initiative* : daya prakarsa, terutama dalam mencapai langkah-langkah yang tepat dan jitu dalam mencapai tujuan, *Esprit de corps* : semangat kesatuan dalam korps. (Syafri, M.si, 2012 :Studi Tentang Administrasi Publik).

Semua prinsip administrasi tersebut di atas dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tertib administrasi yang baik. Penerapan prinsip-prinsip tersebut harus disertai kepehaman supaya hasilnya tidak justru menimbulkan efek bumerang yakni justru menimbulkan kekacauan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang baik agar dapat mencapai hasil yang baik.

## 3. Efisiensi sebagai prinsip Administrasi

Efisiensi merupakan prinsip yang paling penting dalam administrasi. Secara etimologis, efisiensi berasal dari bahasa *efficere* artinya menghasilkan, mengadakan, atau menjadikan. Dalam perkembangannya, efisiensi mengandung pengertian yang lebih teknis yakni menunjukkan rasio (perbandingan) antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Efisiensi dalam arti yang

lebih luas berarti memaksimalkan rasio hasil bersih yang positif (imbangan terbaik antara konsekuensi/akibat yang diinginkan atas konsekuensi/akibat yang tidak diinginkan) dengan biaya usaha yang dikeluarkan. Dalam arti yang lebih rinci terdapat dua alternatif yaitu: efisiensi berarti dapat mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya usaha tertentu dan dapat mencapai hasil tertentu dengan biaya usaha seminimal mungkin.

Sebagai proses, administrasi dinyatakan sebagai mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) yang pada dasarnya berkenaan dengan efisiensi, dan oleh karena keseluruhan proses tersebut merupakan konsep dasar administrasi maka efisiensi dipandang pula sebagai kerangka dasar administrasi.

#### 4. Definisi Tertib Administrasi

Terkait dengan Definisi tertib administrasi secara keseluruhan ataupun secara khusus baik pada sebuah buku tentang ilmu administrasi ataupun situs internet memiliki kesulitan untuk menemukan arti dari definisi tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1985), tertib administrasi diartikan aturan, peraturan yang baik. Mengacu dari arti tersebut, penulis menjabarkan dengan pemikirannya bahwa Tertib Administrasi adalah kegiatan tata usaha yang baik dari suatu organisasi dan mengacu pada sebuah peraturan dalam organisasi tersebut, dalam hal pencatatan pada buku administrasi dan pengarsipan berkas agar tidak tumpang tindih sehingga data yang terpapar benar - benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### 5. Definisi Administrasi Desa

Sebagaimana pendapat ahli bahwa, "... administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa" (Nurcholis, 2011, 135), berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa administrasi tidak hanya berjalan dalam lingkup daerah, namun di lingkup desa juga dijalankan suatu proses kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan suatu pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memenuhi unsur-unsur dan prinsip-prinsip administrasi.

Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa.

#### 6. Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Status desa adalah satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan, desa atau yang disebut lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut, kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi yang membawahi desa-desa, melainkan hanyalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Camat adalah tangan panjang bupati di wilayah kerja

tertentu yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap desa-desa.

Untuk membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban selaku pimpinan pemerintah desa, maka dibentuklah sekretariat desa selaku unsur staf, dikepalai sekretaris desa yang membawahi kepala-kepala urusan seperti : Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pemberdayaan masyarakat, Kepala Urusan Kesra (Kesejahteraan masyarakat), Kepala Dusun.

Apabila kepala desa berhalangan maka sekretaris desa menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari kepala desa. Sistem administrasi masyarakat ditingkat desa di Indonesia sudah memiliki tata struktur yang baik dari mulai adanya kepala desa sampai staf-staf pembantu kepala desa yang sering disebut juga perangkat desa. Hampir di seluruh desa dalam wilayah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desa yang sama antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, dan antara desa yang satu dengan desa yang lain, sehingga tatanan pemerintahan ditingkat desa bisa berjalan dengan baik dan tersistem. Berikut tugas dan fungsi dari kepala desa dan perangkat desa dalam suatu pemerintahan desa:

Di Desa Taman sendiri, Tertib Administrasi yang diselenggarakan di kantor Desa Taman adalah suatu proses untuk melaksanakan dan meningkatkan kegiatan disiplin kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, kemudahan kerja guna mencapai administrasi yang baik yang meliputi kelengkapan buku administrasi, pelaporan dan kearsipan. Dengan meningkatkan ketertiban serta ketepatan waktu yang tentunya didukung dengan kesadaran seluruh perangkat tentang pentingnya tertib administrasi desa dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan pelayanan tersebut.

Pelaporan dan kearsipan di Desa Taman merupakan proses akhir yang sangat penting yang harus terus ditingkatkan ketertibannya dalam manajemen organisasi untuk menjamin pencapaian tujuan serta sasaran pelaksanaan tugas. Dimana salah satu komponen pelaporan diawali dengan kondisi tertib administrasi. Secara umum tertib administrasi adalah tertatanya dan terlaksananya semua kegiatan kantor dan tata usaha sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang ditetapkan.

### **III. Metode Penelitian**

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* artinya adalah cara atau menuju suatu jalan. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, "...penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten" (Ruslan, 2003, 24). Dapat dipahami dari pembahasan tersebut bahwa metode merupakan salah satu unsur dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian.

Untuk mencapai tujuan penelitian sebagaimana tercantum pada Bab I proposal ini, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif pada hakekatnya

ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Dengan menggunakan metode kualitatif, data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Menggunakan metode kualitatif, hanya dapat diteliti beberapa variabel saja, sehingga seluruh permasalahan yang telah dirumuskan tidak akan terjawab dengan metode kuantitatif. Dengan metode kualitatif akan dapat diperoleh data yang lebih tuntas dan pasti sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai sumber data primer yang dikumpulkan secara langsung dan sebenarnya dari lapangan dan diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan salah satu warga. Dan juga sumber data sekunder yang bersumber dari arsip, dokumen-dokumen, artikel-artikel, ataupun jurnal-jurnal dan sumber-sumber yang relevan untuk melengkapi informasi yang diperlukan peneliti. Yang menjadi sumber tertulis dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku administrasi yang digunakan untuk penyelenggaraan tertib administrasi Desa.

Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan sampel sumber data dan teknik pengumpul data adalah Wawancara (interview). Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan mewawancarai langsung informan/narasumber dengan berdasarkan masalah yang akan diteliti. Disamping wawancara, peneliti juga melakukan metode observasi. Dari Observasi yang dilakukan sangat memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena beberapa sebab tidak diungkapkan secara terbuka dalam wawancara. Sehingga peneliti dapat menemukan data yang dimaksud dan dapat menjabarkannya tanpa melalui wawancara dengan narasumber.

Dalam hal teknik analisis data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dan Spradly. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh (Sugiyono, 183, 2014).

#### **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Gambaran Umum**

Desa Taman merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah kurang lebih 652,11 Hektar, yang terdiri dari tanah sawah seluas 252,09 hektar, tanah kering (tegal) seluas 266 hektar, pemukiman penduduk seluas 134,2 hektar dengan batas-batas wilayah sebagai ebelah utara berbatasan dengan Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pekauman Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tegal Mijin dan Desa Grujugan Kidul Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Dadapan dan Desa Dawuhan Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso.

Desa Taman merupakan daerah dataran rendah dengan jenis tanah yang terbagi menjadi 2 jenis yaitu tanah kering yang digunakan oleh masyarakat setempat sebagai pemukiman dan lahan pertanian untuk tanaman pertanian yang tidak memerlukan banyak air, seperti : tanaman

tebu, jagung, kayu, singkong, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis tanah basah yang dapat dengan mudah teraliri oleh irigasi sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian.

Desa Taman merupakan desa yang beriklim tropis dengan suhu udara yang relatif dingin karena dipengaruhi oleh angin darat dan masih banyaknya pepohonan sebagai pelindung, juga dipengaruhi dengan masih banyaknya lahan kosong yang digunakan untuk pertanian, sehingga udara di Desa Taman masih terbilang bebas dari polusi yg disebabkan oleh asap kendaraan ataupun pabrik besar seperti di kota-kota besar.

Membahas kondisi infrastruktur Desa Taman terbilang sudah cukup baik, karena setiap tahun diadakan perbaikan jalan yang rusak, disamping itu jalan yang masih berupa jalan tanah sudah tersentuh oleh proyek desa yang dialokasikan untuk pemasangan jalan paving pada akses jalan yang masih berupa jalan tanah. Karena pada tahun 2016 dana desa yang turun dari pemerintah pusat diutamakan untuk pembangunan jalan berupa jalan paving (*wawancara kepala desa Taman; Tatok Bely Belnadi, 22 Desember 2016*). Sehingga pada saat tiba musim hujan, jalan tanah yang biasanya sulit dilalui warga karena becek, sekarang sudah teratasi.

Penduduk Desa Taman tersebar di 4 Dusun yaitu, Dusun Congkrong Barat, Dusun Congkrong Timur, Dusun Pejagan dan Dusun Pasnan. Dimana masing-masing dipimpin dan dikoordinir oleh seorang Kepala Dusun (KASUN) yang bertugas melayani kebutuhan administrasi dan menangani permasalahan yang muncul di wilayahnya masing-masing. Dalam keempat dusun tersebut terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) dan 77 Rukun tetangga (RT). Rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3.137 jiwa, dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 3.013 jiwa.

Sejalan dengan kondisi alam dan letak geografisnya sebagai wilayah daratan dan berada di lingkungan pusat kecamatan, pedagang dan petani masih mendominasi mata pencaharian warga di Desa Taman, Kecamatan Grujugan, sebagian besar penduduknya mempunyai setidaknya jenis usaha rumahan baik dalam skala kecil ataupun skala besar. Disamping itu menurut data survey Desa Taman, sampai saat ini sektor usaha di Desa Taman dinilai cukup berpotensi untuk menunjang perekonomian masyarakat setempat. Di tempat kedua adalah petani, hal ini mengingat Desa Taman termasuk wilayah yang banyak terdapat lahan pertanian, sehingga warga setempat cenderung memilih untuk bertani. Selain itu, warga di Desa sebagian besar mempunyai lahan pertanian baik itu berupa warisan dari leluhur ataupun hasil dari pembelian.

Di desa Taman, kesadaran akan lingkungan sehat masih kurang tertanam di masyarakat, karena masih banyak penduduk yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungannya. Sehingga penyakit yang sering dikeluhkan dan menyerang masyarakat di Desa Taman terutama disepanjang tahun 2016 adalah Demam berdarah. Hal ini karena kondisi lingkungan Desa Taman pada umumnya disekitar pemukiman penduduk masih banyak terdapat tanah kosong yang ditumbuhi semak belukar ataupun tanaman liar, bahkan banyak yang menggunakan lahan kosong tersebut sebagai tempat pembuangan sampah yang dapat menjadi sarang nyamuk dan sumber penyakit demam berdarah. (*wawancara kepala desa Taman; Tatok Bely Belnadi, 24 Desember 2016*). Fasilitas kesehatan Masyarakat Desa Taman masih bergantung pada pelayanan Polindes dan Puskesmas. Rumah sakit umum ataupun rumah sakit swasta bisa dikatakan hanya sebagai tempat rujukan apabila penyakit yang diderita warga cukup parah dan memerlukan perawatan

yang lebih intensif atau membutuhkan penanganan langsung dari dokter ahli, mengingat fasilitas yang ada di Puskesmas ataupun Polindes termasuk obat-obatan dan alat-alat kesehatan belum memadai apabila digunakan untuk menangani penyakit yang dinilai parah dan serius.

Di sektor pendidikan, pendidikan di Desa Taman dapat dinilai sedang berkembang. Hal ini dikarenakan Desa Taman termasuk dalam Kategori desa yang dekat dengan Kabupaten Kota yaitu kabupaten bondowoso yang sudah tentu cukup tersedia sarana dan prasarana pendidikannya, baik di wilayah desa Taman sendiri maupun di desa lain yang berdekatan, sehingga memudahkan bagi anak-anak atau penduduk yang dikategorikan usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan pada tingkatan yang ada. Untuk tingkatan Sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) penduduk desa Taman ditingkatkan sekolah tersebut sebagian besar bersekolah di wilayah kota yaitu Kota Bondowoso. Karena di Desa Taman sendiri hanya terdapat 1 sekolah menengah pertama (SMP), yaitu SMP Negeri 1 Grujugan dan hanya terdapat 1 SMK yaitu SMK Negeri Grujugan.

Penduduk Desa Taman hampir seluruhnya adalah pemeluk agama Islam, adapun pemeluk agama lain di Desa Taman ini tidak ada kecuali agama Islam. Berdasarkan informasi dari wawancara dengan sekretaris Desa Taman, tanggal 26 Desember 2016 tidak adanya penganut agama lain di Desa Taman, dikarenakan penduduk Desa Taman semua menganut agama yang dipeluk nenek moyang mereka yang semua beragama islam.

Berbicara adat istiadat, Di desa Taman sendiri karena letaknya masih terbilang sangat dekat dengan pusat kota yang kita ketahui lebih banyak menyerap perkembangan teknologi modern. Namun di Desa Taman, masih ada beberapa orang tua yang mendoktrin putra putri mereka untuk mengikuti dan menghormati adat istiadat leluhurnya.

Desa Taman merupakan desa yang sudah berkembang, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam sarana dan prasarana yang sudah banyak di bangun oleh pemerintahan Desa Taman, yang tentunya demi kesejahteraan penduduk desa Taman sendiri.

Visi Desa Taman adalah “ **Membangun Suatu Pemerintahan dan Kerjasama yang Baik, Bersih dan Transparan Guna Mewujudkan Pelayanan dan pembangunan yang Optimal Demi Kepentingan Masyarakat.**” (*sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2015-2018*).

Misi Desa Taman merupakan usaha dan landasan dasar untuk mencapai visi Desa Taman. Misi merupakan penjabaran dari visi. Penjabaran ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan di lingkungan Desa Taman yang akan datang.

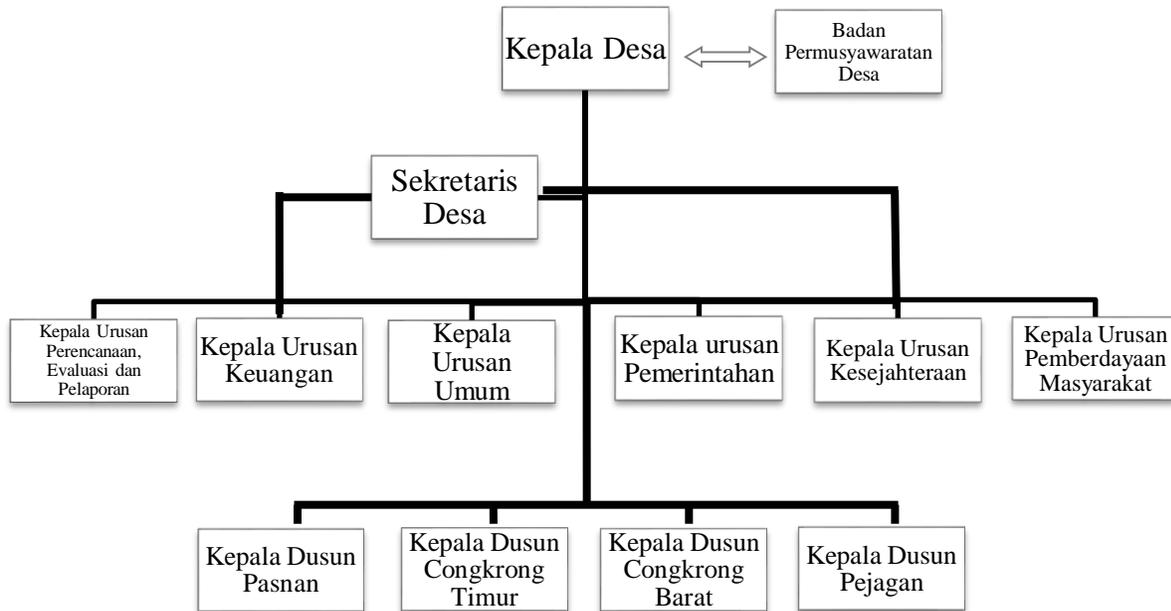
Dalam meraih visi Desa Taman yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal maka disusunlah misi Desa Taman sebagai berikut, Mewujudkan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan hidup, Mengoptimalkan system kinerja aparatur pemerintahan desa sesuai dengan tupoksi, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan akan melaksanakan koordinasi setiap rencana dan permasalahan kepada mitra kerja, Meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat desa, Memperhatikan kesejahteraan guru ngaji dan guru madrasah diniyah guna membangun generasi yang berakhlakul karimah dan agamis.

Arah kebijakan pembangunan Desa Taman periode 2015 hingga 2018 untuk mendanai

pelaksanaan kewenangan berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa, arah kebijakan pembangunan Desa tertuju pada pembangunan sarana dan prasarana desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan

Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Dimana perangkat desa terdiri dari Sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Berikut struktur Organisasi pemerintah Desa Taman.

*Bagan Struktur organisasi Pemerintah Desa Taman Kecamatan Grujugan*



## 2. Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Taman

Pengelolaan administrasi pada semua tingkatan organisasi termasuk organisasi Pemerintahan Desa merupakan suatu tuntutan yang sangat diperlukan, karena dengan terbentuknya administrasi yang baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan dengan kata lain bahwa suatu kegiatan pemerintahan pada tingkat Desa akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu sistem administrasi yang tertib dan teratur.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tugas dan fungsi pemerintah desa begitu luas dan kompleks yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berarti tugas pemerintah desa juga demikian adanya, dengan adanya perangkat desa yang merupakan salah satu unsur pemerintahan desa, oleh karena itu untuk kepentingan terselenggaranya tertib administrasi desa salah satu bentuk dari tugas perangkat desa meliputi: pencatatan register administrasi dan penyimpanan dokumen (kearsipan).

Keterkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggali informasi dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu kepala Desa Taman, sekretaris Desa Taman, dan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Taman yang telah ditentukan peneliti dengan berbagai pertanyaan tentang :” Bagaimana penyelenggaraan tertib administrasi desa di Desa Taman Kecamatan Grujugan?”. Dari hasil penelitian, penyelenggaraan tertib administrasi di Desa Taman sudah

mulai terlaksana, tetapi masih belum sepenuhnya, masih ada beberapa administrasi yang belum tertata dan belum tertib.

Adapun proses Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Taman dapat dilihat dalam uraian berikut:

### 2.1. Pencatatan atau registrasi Administrasi Desa Taman

Register adalah suatu aktivitas pemerintahan dengan maksud untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa dan mencatat kegiatan yang telah terjadi melalui pencatatan-pencatatan di dalam format yang telah ditetapkan..

Mengingat hal tersebut diatas, peneliti melakukan penelitian pencatatan administrasi di Desa Taman, peneliti menggali informasi melalui wawancara dengan kepala Desa Taman Tatok Bely Belnadi tentang “Bagaimana upaya pemerintah desa untuk mencatat kegiatan administrasi Desa Taman, guna menyajikan informasi yang akurat kepada pemerintah daerah ataupun pusat?”.

Tidak hanya laporan kegiatan kerja saja. Tidak kalah pentingnya, Pemerintah desa Taman juga secara rutin mencatat pelaporan administratif, seperti: data penduduk, meliputi kelahiran, kematian, penduduk yang pindah dan penduduk yang datang atau pindah dari wilayah lain ke wilayah Desa Taman setiap bulannya.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, akan tergantung kepada perencanaan kerja dan ketertiban administrasi. Penyusunan perencanaan akan bersumber kepada data dan informasi, oleh karena itu ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa yang diuraikan pada Bab II Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut yang mengatur tentang Jenis dan Bentuk Administrasi Desa. Dalam suatu instansi pemerintahan banyak terdapat jenis administrasi yang harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin. Dimana administrasi tersebut terbagi menjadi beberapa kategori.

Mengacu kepada keterangan diatas, peneliti menggali informasi dengan melakukan penelitian langsung di Kantor Balai Desa Taman Kecamatan Grujugan untuk memperoleh data mengenai jenis administrasi apa saja yang terdapat dalam sitem pamerintahan Desa Taman Kecamatan Grujugan. Dari hasil observasi, peneliti menggali informasi pecatatan administrasi di Desa Taman, peneliti menemukan beberapa jenis administrasi yang selama ini dicatat dalam bentuk buku dengan berbagai kolom dan cara pengisiannya, jenis administrasi di Desa Taman adalah sebagai berikut:

#### 1) Administrasi Umum.

Berisi tentang pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada buku administrasi umum, dimana menurut informasi yang didapat peneliti dari penelitian langsung di Kantor Balai Desa Taman, buku Administrasi Umum Desa Taman terbagi menjadi beberapa poin, yaitu: Buku Data Peraturan Desa Taman, Buku Keputusan Desa Taman, Buku Aparat /perangkat Desa Taman, Buku Register Surat Keluar, Buku Register Surat Masuk, Buku Tamu, Buku Kendali, Buku Kegiatan, Buku Agenda Ijin Keramaian, Buku Daftar Piket Perangkat, Buku Agenda Notulen Rapat.

Peneliti mendapatkan informasi gambaran umum tentang Penyelenggaraan Tertib Administrasi Umum Desa Taman yang selama ini telah berjalan, khususnya tertib Administrasi umum Desa Taman Kecamatan Grugujan.

## 2) Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan melalui Kepala Desa/lurah dan camat, karena membawa implikasi perubahan data dan identitas atau surat keterangan kependudukan dan setiap pelaporan tersebut pula dilakukan pencatatan dan pengadministrasian secara tertib.

Berangkat dari pemikiran dan peraturan di atas, peneliti menggali informasi melalui wawancara kepada Kepala Desa Taman tentang “Bagaimana gambaran umum tentang penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Desa Taman?”.

Untuk mendapatkan data tentang pencatatan dan model laporan administrasi di Desa Taman, peneliti menggali informasi dengan penelitian langsung ke Kantor Balai Desa, berdasarkan hasil penelitian langsung, administrasi kependudukan di Desa Taman terbagi menjadi 4 poin yaitu: Laporan Penduduk Datang, Laporan Penduduk Pindah, Laporan Kelahiran, Laporan Kematian. Dimana laporan-laporan tersebut masih belum sepenuhnya terisi dengan lengkap.

## 3) Administrasi Keuangan.

Peneliti melakukan penelitian langsung di Kantor Balai Desa Taman, bagaimana tertibnya proses pencatatan Administrasi keuangan dalam laporan administrasi Keuangan di Desa Taman, ada beberapa laporan Administrasi keuangan Desa Taman yaitu: Laporan Ringkasan APBDes, Laporan Keuangan Pembangunan Fisik dan Infrastruktur Desa, Laporan keuangan Pemberdayaan Desa

Berdasarkan data yang didapat dari penelitian langsung, pengisian laporan keuangan APBDes, pembangunan fisik dan pemberdayaan di Desa Taman sangat baik, tertib, dan akurat.

## 4) Administrasi Pembangunan.

Berdasarkan informasi yang didapat peneliti dari penelitian langsung, tertib administrasi pembangunan di Desa Taman dapat dilihat dari pencatatannya dalam dua buku administrasi, yaitu: Buku Rencana Kerja dan Pembangunan Desa, Buku Kegiatan Pembangunan.

Berdasarkan data diatas yang diperoleh oleh peneliti ,melalui pengamatan langsung buku kegiatan pembangunan Desa Taman, dari 10 kolom yang tersedia, semua kolom tercatat dan terisi dengan lengkap.

### 5) Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan hasil penelitian diatas, di Desa Taman juga diselenggarakan ketertiban pencatatan Administrasi BPD yang dibagi menjadi 2 buku administrasi BPD yaitu: Buku Anggota BPD, Buku Kegiatan BPD.

Dalam pengisian buku Administrasi BPD Pemerintah Desa Taman dinilai tidak tertib dan disiplin, hal ini dikaitkan dengan hasil penelitian diatas, dari buku Kegiatan yang tersedia untuk administrasi BPD, hanya terisi 2 kolom dari 5 kolom yang tersedia.

### 6) Administrasi Pertanahan.

Dari hasil penelitian yang didapat, administrasi pertanahan di Desa Taman tercatat dalam 2 buku tanah, yang diuraikan sebagai berikut : Buku Tanah , Buku Register perubahan Hak Atas Tanah.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari penelitian langsung terhadap 2 buku administrasi pertanahan Desa Taman, pencatatan buku administrasi tanah di Desa Taman sangat tertib dan lengkap.

### 3. Penyimpanan Dokumen (Kearsipan)

Penyimpanan dokumen-dokumen atau arsip secara baik adalah salah satu gambaran dari Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa. Dengan penyimpanan arsip yang baik dapat membantu memudahkan perangkat desa untuk menemukan kembali jika ada data yang sebelumnya dibuat hilang, tetapi dibutuhkan kembali untuk suatu kepentingan. Dengan di tertibkannya penyimpanan seluruh dokumen desa, juga membantu perangkat desa untuk membandingkan apabila surat ataupun data yang sebelumnya dirubah dan disalahkanggunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti dari penelitian langsung di Kantor Balai Desa Taman juga dari wawancara Sekretaris Desa Taman, penyimpanan dokumen dan arsip di Kantor Balai Desa Taman belum terselenggara dengan baik, sekalipun di Kantor Balai Desa Taman sudah terdapat peraturan dan tata cara kerja berupa petunjuk untuk penyimpanan dokumen. Oleh Karena itu perangkat Desa Taman dinilai kurang mampu dan kurang disiplin dalam menyusun dan menyimpan dokumen-dokumen dan arsip guna terwujudnya Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Taman Kecamatan Grujugan.

Berdasarkan seluruh uraian sebelumnya, khususnya uraian tentang kondisi rill pelaksanaan, penyelenggaraan tertib administrasi Desa Taman, yang meliputi : pencatatan register, dan penyimpanan dokumen/arsip, peneliti memperoleh gambaran umum tentang Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa di Desa Taman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Yaitu Pemerintah Desa Taman sudah mulai menyelenggarakan tertib administrasi dengan cukup baik namun masih kurang efektif. Mengingat masih adanya beberapa kolom pada buku administrasi yang masih belum terisi penuh. Hal tersebut juga terlihat dari Tertib administrasi Kependudukan yang di dalamnya hanya tercatat penduduk yang melapor saja, sesuai dengan pernyataan kepala Desa Taman yang dikuatkan oleh pernyataan Kepala Urusan Pemerintahan dalam wawancaranya pada tanggal 24 Desember 2016. Tidak tertibnya administrasi Desa Taman Juga terdapat pada pengisian Administrasi BPD pada buku kegiatan, di mana masih terdapat kolom yang kosong.

Disamping itu, dalam konteks kedisiplinan yang berperan penting untuk berhasilnya Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa Taman, dari pengamatan penulis selama melakukan penelitian terlihat bahwa ada beberapa perangkat desa dengan pengetahuan minim yang hanya sekedar datang tanpa mengetahui aturan-aturan administrasi dalam pemerintahan Desa. Juga terlihat beberapa perangkat yang sengaja atau tidak sengaja bekerja tanpa memperhatikan ketertiban administrasi dalam pekerjaannya, contoh kecilnya adalah: ada beberapa perangkat desa yang lalai dan lupa untuk mencatat atau menyimpan surat keterangan yang dikeluarkan pihak desa untuk kepentingan warganya. Keadaan tersebut, dinilai oleh peneliti, dapat menghambat sinergitas kerja antara perangkat desa yang satu dengan yang lain untuk mewujudkan Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa di Desa Taman, Kecamatan Grujung, Kabupaten Bonndowoso.

#### **4. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA**

Dari uraian gambaran umum sebelumnya, terutama uraian tentang kondisi riil tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa di Desa Taman. Peneliti mencoba menggali lebih dalam lagi, yaitu tentang informasi Faktor pendukung dan Faktor penghambat yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa di Desa Taman. Berikut di paparkan factor-faktor tersebut diantaranya :

##### **A . Faktor Pendukung**

1. Kelengkapan petunjuk pengisian kolom pada buku-buku register administrasi desa merupakan hal yang sangat mendukung untuk terselenggaranya tertib administrasi Desa di Desa Taman, karena dijadikan acuan untuk perangkat desa dalam penyelenggaraannya. Dari hasil penelitian sangat jelas ditemukan petunjuk pengisian secara lengkap termasuk format-format pada buku register tersedia di kantor desa begitupun untuk penyimpanan dokumen.
2. Sarana kantor yang memadai mempermudah perangkat desa dalam bekerja,. Dari hasil pengamatan, sarana yang dimiliki kantor Desa Taman cukup memadai untuk Penyelenggaraan tertib administrasi desa di Desa Taman, seperti :terdapat 2 unit seperangkat computer dan 1 unit laptop, tersedianya meja kerja dan kursi sesuai dengan jumlah perangkat desa, 1 unit mesin ketik manual, 2 buah lemari penyimpanan dokumen, juga terpasang wi-fi yang bisa digunakan untuk mengirim laporan kerja secara online.
3. Penataan struktur pemerintah desa yang tertata sesuai dengan keahlian sangat mempengaruhi penyelenggaraan tertib administrasi desa, di DesaTaman sudah tertata struktur pemerintah desa dengan baik. Dimana setiap perangkat desa mempunyai bagian tugas masing masing sesuai dengan tupoksinya.
4. Selektif dalam pemilihan calon perangkat menunjang berjalannya tertib administrasi desa, karena pemerintahan desa membutuhkan perangkat yang mampu bekerja dengan baik dan memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa keempat faktor yang diuraikan di atas sangat berperan penting untuk Penyelenggaraan tertib administrasi Desa di Desa Taman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso.

## B . Faktor Penghambat

### a. Kesadaran Perangkat Desa Dalam Disiplin Kerja

Faktor kedisiplinan kerja setiap perangkat desa dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya merupakan salah satu faktor penghambat yang menentukan efektif atau tidaknya penyelenggaraan tertib administrasi desa. Namun kenyataannya dari hasil penelitian langsung dan wawancara, menunjukkan bahwa faktor ini kurang dimiliki oleh beberapa perangkat Taman dalam pencatatan dan penyimpanan dokumen administrasi Desa Taman, ditinjau dari tidak terisinya beberapa kolom pada buku administrasi dan tidak tersimpannya beberapa dokumen di Desa Taman. Selain itu juga terkait dengan lalainya para kepala dusun untuk melaporkan perubahan data penduduk di setiap wilayahnya.

### b. Kemampuan Kerja Perangkat

Faktor kemampuan kerja yang dimaksud dalam uraian ini adalah kemampuan yang ditinjau dari aspek ilmu pengetahuan tentang peraturan-peraturan administrasi desa, dan sumber daya manusia setiap perangkat desa terhadap tugas yang telah ditentukan pada setiap hari kerja. Dari uraian sebelumnya menunjukkan bahwa masih ada beberapa perangkat yang bekerja hanya sekedar bekerja tanpa mengetahui aturan tertib administrasi.

Dengan kata lain, bahwa salah satu faktor yang berpengaruh negatif dan dapat menghambat kemampuan terhadap pelaksanaan tugas perangkat desa sehingga menyebabkan kurang efektifnya penyelenggaraan tertib administrasi desa di Desa Taman.

### c. Kesadaran Masyarakat Setempat

Kesadaran Masyarakat tentunya juga sangat berpengaruh untuk kesuksesan Penyelenggaraan tertib administrasi desa, terutama di bidang administrasi kependudukan. Dari pembahasan sebelumnya didapatkan informasi bahwa masih ada penduduk Desa Taman yang tidak melapor pada pihak desa jika ada perubahan data penduduk seperti :saat pindah ke wilayah lain, datang dari wilayah lain, juga pada saat ada kelahiran ataupun kematian, sehingga menyebabkan keterlambatan pihak desa untuk mengirim laporan perubahan data kependudukan setiap bulannya.

### d. Sosialisasi dari Pemerintah Kecamatan

Sosialisasi dari pemerintah kecamatan tentang tata cara dan pentingnya penyelenggaraan tertib administrasi desa harus sering terlaksana. Mengingat pemerintah desa merupakan binaan langsung dari pemerintah Kecamatan.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### a. Kesimpulan

Dilihat dari hasil penelitian di atas di Desa Taman terdapat 6 jenis administrasi. Yaitu: administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, administrasi BPD, dan administrasi pertanahan.

Dari pembahasan yang telah dikemukakan berdasarkan penelitian langsung dan wawancara, maka dapat digambarkan bahwa penyelenggaraan tertib administrasi desa di Desa Taman, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso dilakukan melalui pencatatan atau register administrasi yang terbagi menjadi beberapa bagian, dan dicatat dalam buku-buku administrasi desa yang di dalamnya terdapat berbagai kolom yang harus diisi dengan lengkap berikut juga terdapat cara pengisiannya, dengan kesesuaian pedoman kerja. Dan juga melalui tertibnya penyimpanan dokumen (kearsipan) di Kantor Balai Desa Taman, penyimpanan dokumen tersebut berupa data-data dan surat-surat penting

Penyelenggaraan tertib administrasi desa di Desa Taman sudah terlaksana tetapi masih kurang efektif, Hal ini dilihat dari masih adanya beberapa kolom dari buku-buku administrasi yang masih belum terisi dengan lengkap. Dan masih kurangnya kedisiplinan dari perangkat desa dalam tertib kearsipan atau penyimpanan dokumen.

Terwujudnya Penyelenggaraan tertib administrasi desa di Desa Taman di pengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dari penjelasan di atas meliputi: lengkapnya pedoman pengisian buku administrasi, lengkapnya perangkat keras yaitu sarana dan fasilitas kerja, pembentukan struktur kerja yaitu penataan dan pembagian tugas pada perangkat desa, dan selektif perekrutan perangkat desa. Disamping itu juga dipengaruhi oleh faktor penghambat yang meliputi : Kurangnya kesadaran perangkat desa dalam disiplin kerja, Kemampuan kerja perangkat desa, Kesadaran masyarakat desa, dan sosialisasi Tertib administrasi dari pemerintah kecamatan terhadap perangkat desa.

### b. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, disarankan oleh peneliti untuk penyelenggaraan tertib administrasi, adapun beberapa saran yang dikemukakan diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk terwujudnya penyelenggaraan tertib administrasi desa di Taman, maka peningkatan disiplin dan kesadaran perangkat desa untuk selalu mengisi buku-buku administrasi di Desa Taman harus diutamakan, dan selalu disiplin dalam menyimpan dokumen yang berisi data-data dan surat-surat penting terkait pemerintahan Desa.
2. Untuk terwujudnya penyelenggaraan tertib administrasi desa, maka diharapkan kepada Kepala Desa mengajukan atau meminta pihak pemerintah kecamatan Grugugan untuk melakukan sosialisasi tentang peraturan dan pentingnya penyelenggaraan tertib administrasi desa secara berkala, dan menekankan seluruh perangkat desa untuk senantiasa mengikuti sosialisasi tersebut.
3. Untuk terwujudnya penyelenggaraan tertib administrasi desa, maka Kepala Desa disarankan untuk selalu selektif dalam perekrutan perangkat desa yang baru, dan

menekankan kepada perangkat desa yang lama untuk segera meninggalkan kebiasaan sistem pemerintahan desa sebelumnya yang kurang memperhatikan tertibnya administrasi desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Ruslan, S.H.M.M.,Rosady. 2003. *Metode Penelitian Publick Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono, Prof.Dr. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, M.Si.,Prof. Dr. H. Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Kusdi. 2009.*Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta:Salemba Humanika
- Nawawi, dan Martini Hadari.1991.*Instrumen Pendidikan Bidang Sosial*.Gajah Mada University Press Yogyakarta
- Moeleong, Lexy J.2000.*Metodologi Penelitian Kualitatif* P.T Remaja Rosdakarya.Bandung
- Sutoro Eko.2015.*Regulasi Baru, Desa Baru, ide, misi, dan semangat UU Desa*.Kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

### **Sumber internet:**

- <http://adam-afaj-fenomenon.blogspot.com/2009/08/tertib-administrasi.html>
- <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/viewFile/12125/11706>
- [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/.../01\\_artikel\\_ejournal%20\(03-12-15-08-26-05\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/.../01_artikel_ejournal%20(03-12-15-08-26-05).pdf)
- <http://aspadri12.blogspot.com/2013/10/skripsi-upaya-peningkatan-kemampuan.html>
- [journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/download/82/64](http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/download/82/64)

### **Perundang-Undangan:**

- Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 414.3/316/PMD/2003 tentang Register Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2006 tentang administrasi pemerintahan desa